



Pembiayaan di Sekolah Dasar Negeri 4 Semadam Kab. Aceh Tenggara

Melati¹

¹ Administrasi Pendidikan , Pascasarjana , Univeritas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam Tahun Ajaran 2018/2019 berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya. 2) Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam yaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, BOS, Pengalokasian Dana

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mutlak diperlukan oleh semua warga Negara sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dikatakan berhasil apabila dapat menciptakan manusia yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik.

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan tentunya perlu memperhatikan beberapakomponen, diantaranya sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, dan peserta didik, serta komponen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Komponen komponen tersebut sangat penting dan saling berpengaruh

sehingga dapat memberikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keadaan pembiayaan pendidikan di dalamnya, karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Pembiayaan pendidikan yang baik adalah pembiayaan yang mampu memenuhi semua kebutuhan berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, diperlukan kemampuan mengelola yang baik.

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota). Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya pada Pasal 11 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya

pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu, disebutkan pula pada Pasal 12 Ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, pemerintah dan juga masyarakat harus turut serta dalam mengawasi jalannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini

karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya.

Martin 2014; 4, Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti yaitu pada pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam tahun ajaran 2018/2019.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam tahun ajaran 2018/2019?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan

pendidikan di SD Negeri 4 semadam tahun ajaran 2018/2019?

B. KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan Pendidikan

Dadang Suhardan (2014:22) Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.

Harsono (2007: 9) berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah.

Dari pendapat mengenai biaya pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Uhar Suharsaputra (2013: 289) berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiaya, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan.

Dari beberapa pendapat mengenai pembiayaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kajian mengenai sumber-sumber dana dan pengalokasiannya yang diperlukan untuk berbagai keperluan dalam

penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pendidikan harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan berbeda dengan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan besarnya dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan keseluruhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi darimana saja dana diperoleh dan untuk apa saja dana itu digunakan. Pembiayaan pendidikan berarti kegiatan yang ditempuh dalam rangka pencarian sumber dana dan pendistribusiannya untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan.

Menurut Sri Minarti (2011: 238) pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan berikut.

- a. Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan, sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.
- b. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Dari pendapat Sri Minarti tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran pendidikan dilakukan dari penerimaan pembiayaan pendidikan dimana kegiatan tersebut sebisa mungkin dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan

Menurut Tatang M. Amirin, dkk (2010: 89) karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Biaya pendidikan selalu naik, perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan *unit cost*, yang meliputi:

- 1) *Unit cost* lengkap, yaitu perhitungan *unit cost* berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.
- 2) *Unit cost* setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda.
- 3) *Unit cost* sempit, yaitu *unit cost* yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.

b. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai "*human investent*", artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.

c. *Unit cost* pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.

d. *Unit cost* pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga

pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum.

e. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembiayaan pendidikan antara lain biaya pendidikan selalu naik sepadan dengan jenjang pendidikan, biaya terbesar terletak pada faktor manusia, dan komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari ke tahun ke tahun.

3. Jenis Biaya Pendidikan

Salah satu hal yang merupakan konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 mengelompokkan biaya pendidikan menjadi tiga, yaitu:

a. Biaya Investasi

Biaya investasi meliputi biaya:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana
- 2) Pengembangan sumber daya manusia
- 3) Modal kerja tetap

b. Biaya Operasi

Biaya operasi meliputi:

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,

pajak, asuransi dan lain sebagainya.

c. Biaya Personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3 biaya pendidikan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Biaya Satuan Pendidikan

Biaya satuan pendidikan terdiri dari:

- 1) Biaya investasi yang terdiri

atas:

- a. Biaya investasi lahan pendidikan
- b. Biaya investasi selain lahan pendidikan

- 2) Biaya operasional yang terdiri atas:

a. Biaya personalia

b. Biaya non personalia

3) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

4) Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi:

- 1) Biaya investasi yang terdiri dari:

a) Biaya investasi lahan pendidikan

b) Biaya investasi selain lahan pendidikan

- 2) Biaya operasi yang terdiri dari:

a) Biaya personalia

- b) Biaya nonpersonalia
- c. Biaya pribadi peserta didik

Menurut Uhar Suharsaputra (2013: 289) biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi:

a. *Direct cost* dan *indirect cost*

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan dimana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji gurudan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dan lain-lain. Sementara itu, *indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

b. *Sosial cost* dan *private cost*

Sosial cost dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang).

Menurut Sri Minarti (2011: 222) berdasarkan fungsinya, biaya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Biaya administrasi, yaitu biaya-biaya untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan proses belajar mengajar, seperti gaji kepala sekolah, gaji guru, gaji staf administrasi, pembelian buku, fotokopi, alat-alat tulis, dan sebagainya.
- b. Biaya umum, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan umum, seperti biaya pemeliharaan gedung, peralatan sekolah, biaya penyusutan, biaya listrik, dan telepon.

- c. Biaya promosi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempromosikan sekolah, seperti biaya pembuatan pamflet atau brosur, biaya tenaga promosi, dan biaya iklan radio atau koran.

Harsono (2007: 9) menggolongkan biaya pendidikan menurut sumbernya menjadi 4 jenis, yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua/ wali siswa, masyarakat bukan orang tua/ wali siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pendapatan sekolah yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah (propinsi dan kabupaten) diperoleh dengan cara sekolah mengajukan proposal ke pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pendapatan sekolah yang berasal dari orang tua/wali siswa diperoleh dari SPP dan insidental, yang berasal dari masyarakat bukan orang tua/ wali siswa berupa sumbangan sukarela dari masyarakat yang peduli dengan perkembangan sekolah, sedangkan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri berupa unit produksi sekolah itu sendiri.

4. Sekolah Dasar

Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar.

Barnawi dan Mohammad Arifin (2012: 50) mengungkapkan bahwa pada dasarnya tugas sekolah ialah menyelenggarakan pendidikan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap agar peserta didik melewati proses kedewasaannya dan tergali semua potensi yang dimilikinya secara optimal. Pendapat lain dikemukakan oleh

Mulyasa (2003: 47) yang mengungkapkan bahwa sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan

berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing.

5. Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembiayaan pendidikan di sekolah dilaksanakan guna membiayai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah Dasar Negeri pada umumnya memiliki sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Dina Sofianah (2015) untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selain itu, di beberapa Kabupaten/Kota ada pula kebijakan memberikan dana ke sekolah (SMP/MTs dan SD/MI) yang berasal dari APBD II. Penamaan pemberian dana tersebut bermacam-macam ada yang menyebut dana operasional rutin, dana operasional sekolah (DOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan sebagainya.

6. Kerangka Pikir

SD Negeri 4 semadam merupakan salah satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang berada di Kecamatan semadam Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Sedikitnya jumlah peserta didik di sekolah tersebut menyebabkan dana pendidikan yang diterima terbatas karena bantuan dana dari pemerintah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah. Sementara itu, terdapat komponen-komponen pendidikan yang harus dibiayai dengan dana tersebut,

seperti sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, dan peserta didik, serta komponen-komponen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, banyak kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain: kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan yang telah diprogramkan tersebut membutuhkan dana dari sekolah untuk membiayai bahan, alat, maupun jasa agar kegiatan dapat terlaksana guna mencapai target mutu yang telah ditetapkan.

Sehingga, apabila sekolah mengalami keterbatasan dana dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target mutu yang telah ditetapkan. Peneliti mengumpulkan informasi dari sekolah mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri 4 semadam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 semadam Kab. Aceh Tenggara” ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nurul Zuriah (2006: 47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 60), adalah suatu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri 4 semadam. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Semadam Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara. Proses penelitian yang terdiri dari observasi pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil penelitian berlangsung dari bulan April 2019 hingga Mei 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Poham (2007) dalam Andi Prastowo (2012: 208), teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- wawancara
- observasi
- dokumentasi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Pembahasan

1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri 4 Semadam Tahun Ajaran 2018/2019

Dana pendidikan yang diterima oleh SD Negeri 4 semadam pada Tahun Ajaran 2018/2019 berjumlah Rp 40.180.000,00. Jumlah dana tersebut berasal dari BOS Pusat/BOS Reguler sebesar Rp 27.200.000,00; BOS Provinsi/BOSDA sebesar Rp 4.840.000,00; dan BOS Kabupaten sebesar Rp 8.140.000,00. Dana tersebut dirasa sangat sedikit untuk membiayai keseluruhan komponen maupun program pendidikan di SD Negeri 4 semadam, sehingga sekolah terpaksa harus berusaha untuk dapat

mencukupkan dana yang ada agar program tetap berjalan serta dengan meminimalisir program-programnya dan memprioritaskan program yang dianggap lebih penting.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SD Negeri 4 semadam mengalokasikan dana sebesar Rp 3.664.050,00 dalam mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan. Berdasarkan RKAS, sekolah mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai beberapa program yang telah direncanakan diantaranya

- Pelajaran tambahan/pendalaman materi/les sebesar Rp 1.000.000,00;
- Pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Sekolah sebesar Rp 525.000,00;
- Pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Kabupaten sebesar Rp 1.750.050,00;
- Pelaksanaan Ujian Sekolah sebesar Rp 189.000,00; dan
- Pelaksanaan Ujian Nasional sebesar Rp 200.000,00.

Berdasarkan RKAS, sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.429.750,00 untuk pengembangan Standar Isi. Dana tersebut digunakan sekolah untuk penyusunan kurikulum sebesar Rp 109.900,00; penyusunan silabus sebesar Rp 334.950,00; dan penyusunan RPP dan scenario pembelajaran sebesar Rp 984.900,00. Pada kenyataannya seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah dana yang dialokasikan tersebut ternyata belum mencukupi.

Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp 6.069.350,00 untuk pengembangan standar proses. Berdasarkan RKAS, alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program seperti workshop

peningkatan kompetensi pengembangan sebesar Rp 471.000,00;

- Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sebesar Rp 127.900,00;
- Pelaksanaan lomba OSN sebesar Rp 205.000,00;
- Penyelenggaraan pentas seni/ FLS2N sebesar Rp 860.000,00;
- penyelenggaraan pesantren kilat sebesar Rp 300.450,00;
- Pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar sebesar Rp 1.854.500,00;
- Pengadaan bahan praktik keterampilan sebesar Rp 770.500,00; dan
- Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp 1.480.000,00.

Sekolah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.854.050,00 dalam mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program seperti; p

- Pengadaan komputer sebesar Rp 1.075.050,00;
- Pengadaan ATK proses pembelajaran sebesar Rp 993.000,00; p
- Pengadaan buku pelajaran pokok peserta didik sebesar Rp 625.000,00; perawatan ruang kelas sebesar Rp 3.556.000,00; p
- Perawatan ruang perpustakaan Rp 450.000,00; instalasi listrik
- (Termasuk penggantian lampu) sebesar Rp 1.221.000,00; p

- Pembenahan administrasi/inventarisasi bangunan sebesar Rp 120.000,00; dan p
- Pengadaan alat kebersihan sebesar Rp 814.000,00.

Sekolah mengembangkan Standar Pengelolaan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 2.175.000,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program diantaranya Penyusunan program RAPBS/RKAS sebesar Rp 225.000,00; Penyusunan Laporan Aset Sekolah sebesar Rp 1.000.000,00; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebesar Rp 300.000,00; dan Penyelenggaraan Karang Pamitran/ Kemah bersama sebesar Rp 650.000,00.

Sekolah mengalokasikan sebesar Rp 11.179.900,00. Berdasarkan RKAS, jumlah tersebut oleh sekolah digunakan untuk membiayai beberapa program diantaranya untuk;

- Konsumsi guru/ pegawai sebesar Rp 2.331.000,00;
- Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program sebesar Rp 1.093.900,00;
- Pembayaran rek. Listrik sebesar Rp 900.000,00;
- Pembayaran langganan internet sebesar Rp 750.000,00; pembayaran langganan PDAM sebesar Rp 900.000,00;
- Pembayaran honor guru tidak tetap sebesar Rp 3.260.000,00;
- Pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai sebesar Rp 1.320.000,00;

- Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan sebesar Rp 80.000,00;
- Bantuan siswa miskin sebesar Rp 125.000,00; dan
- Pembelian kebutuhan UKS sebesar Rp 420.000,00.

SD Negeri 4 semadam mengalokasikan sejumlah dana untuk mengembangkan Standar Penilaian Pendidikan sebesar Rp 6.807.900,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan sekolah untuk membiayai beberapa program seperti;

- Penyusunan kisi-kisi UKK sebesar Rp 75.000,00;
- Penyusunan kisi-kisi UAS sebesar Rp 132.000,00;
- Penyusunan soal UH sebesar Rp 1.824.000,00;
- Penyusunan soal UTS sebesar Rp 1.425.000,00;
- Penyusunan soal UKK Rp 863.900,00;
- Penyusunan soal UAS sebesar Rp 261.000,00;
- Pelaksanaan penilaian UH sebesar Rp 175.000,00;
- Pelaksanaan penilaian UTS sebesar Rp 582.000,00;
- Pelaksanaan penilaian UAS sebesar Rp 270.000,00; dan
- Pelaksanaan penilaian UKK Rp 1.200.000,00.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam Tahun Ajaran 2018/2019 berasal dari BOS

Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya.

2. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri 4 semadam yaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Dinas Pendidikan

Melihat keadaan bahwa ada sekolah yang mengalami kekurangan dana akibat sedikitnya jumlah peserta didik, sebaiknya dinas pendidikan membuat mengenaipemberian bantuan dana bagi sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

2. Bagi Sekolah kebijakan

Diharapkan sekolah dapat menyusun RKAS sesuai dengan

kondisi dana yang ada sehingga program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan RKAS yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barnawi & Mohammad, A. (2012). *Schoolpreneurship: Mengembangkan Jiwa & Sikap Kewirausahaan Siswa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suryosubroto., B. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dadang, S., dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Deddy, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Dedi Supriadi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fuad, I. 2013. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Haris, H. (2013). *Wawancara, Observasi, Focus Group*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Jhonatan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, J., L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdyakarya.
- . (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, M., I. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta.
- . (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljani A., N. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nana S., S. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang, F. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nusa, P. (2012). *Penelitian Kualitatif Proses & Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Minart, S. (2011). *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 19*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo. (2006). *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral

Pendidikan Tinggi Direktorat
Ketenagaan.

Uhar, S. (2013). *Administrasi Pendidikan*.
Bandung: PT Refika Aditama

Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur
Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktik..* Jakarta: Rineka Cipta.